

## 14 PNS Pemkab Gianyar Dijebloskan ke Tahanan

★ Jadi Tersangka Dugaan SPPD Fiktif

GIANYAR, NusaBali

Pihak kejaksaan akhirnya jebloskan 14 pegawai negeri sipil (PNS) lingkup Pemkab Gianyar yang tersangkut sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Rp 90 juta melalui Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Fiktif ke sel tahanan, Rabu

(28/10) sore. PNS yang sebagian perempuan ini ditahan di Rutan Gianyar, setelah lebih dulu menjalani pemeriksaan administrasi dan kesehatan di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Gianyar.

Bersambung ke Hal-15 Kolom 5

Edisi : Kamis, 29 Oktober 2015

Hal : 1



Sambungan ---

## 14 PNS Pemkab Gianyar Dijebloskan ke Tahanan!

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

Ke-14 PNS yang dijebloskan ke sel tahanan, Rabu sore sekitar pukul 16.20 Wita itu, masing-masing Sang Ayu Made Ika Kencana Dewi (Staf Camat Tampaksiring), Ni Ketut Juni-antari (Staf Dinas Perhubungan Gianyar), Ni Ketut Suniawati (Staf Bagian Hukum Pemkab Gianyar), Ni Made Ayu Purniasih (Staf Pemkab Gianyar), AA Istri Agung Yunariawati (Staf Camat Gianyar), Ni Wayan Suciasih (PNS Pemkab Gianyar), Dewa Made Putra (Sekretaris Camat Tampaksiring), I Ketut Ritama (Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan Ubud), I Ketut Puja (Staf Camat Tegallalang), I Made Darmaja (Staf Camat Gianyar), I Komang Yastara (Staf Camat Gianyar), I Made Wirawan (PNS Dispenda Gianyar), I Nyoman Sulandra (Staf Camat Ubud), dan I Made Suparta (Staf Dispenda Gianyar).

Sebelum diperiksa di Kejari Gianyar, lanjut dijebloskan ke Rutan Gianyar, Rabu sore, 14 PNS tersangka SPPD fiktif ini lebih dulu dilimpahkan penyidik Polda Bali ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali di Jalan Letda Tantulr Niti Mandala Denpasar. Pihak Kejati Bali kemudian menyerahkan penanganan kasus ini berikut para tersangkanya ke Kejari Gianyar.

Para PNS tersangka SPPD fiktif ini dibawa dari Kejati Bali hingga tiba di Kejari Gianyar, Rabu siang sekitar pukul 11.00 Wita. Begitu tiba, mereka langsung menjalani pemeriksaan administrasi dan kesehatan. Ke-14 PNS tersangka SPPD fiktif ini didampingi tiga pengacara

Pantauan NusaBali, kedatangan para tersangka di Kejari Gianyar kemarin, sempat dijenguk sejumlah anggota keluarga mereka. Beberapa di antara anggota keluarga itu sempat menan- gis, sehingga mengundang perhatian sejumlah pegawai Kejari Gianyar. Oleh pegawai ke-

jaksan, anggota keluarga yang menangis itu disarankan menin- ggalkan kantor Kejari Gianyar. Sedangkan 14 PNS tersangka SPPD fiktif langsung mengena- kan masker dan mengambil jaket serta kain untuk menutupi wajahnya, begitu mengetahui kedatangan awak media.

Kepala Kejaksaan Negeri (Ka- jari) Gianyar, I Ketut Sumedana SH, mengatakan pihaknya hanya menerima limpahan berkas kasus dan para tersangka, berikut barang bukti, dari Kejati Bali. Kemudian, para tersangka menjal- anikan pemeriksaan administrasi dan kesehatan, sebelum kemud- ian diangkut ke Rutan Gianyar, Rabu sore pukul 16.20 Wita, menggunakan Minibus.

"Setiap tersangka kasus dugaan korupsi pasti kami taha- n. Ini untuk mempermudah dalam proses hukum. Selain itu, agar tersangka tidak melarika- n diri, tidak menghilangkan barang bukti, serta tidak meng- pengaruhi yang lain," ujar Kajari Ketut Sumedana.

Menurut Sumedana, pen- gacara para tersangka sudah sempat coba mengajukan permohonan agar pihak kejaksaan tidak menahan kliennya. "Namun, permohonan itu tetap tidak kami kabulkan," katanya.

Salah satu kuasa hukum 14 PNS tersangka SPPD fiktif, Bernadin SH, juga mengakui pihaknya sudah mengajukan permohonan agar tidak ada penahanan terhadap kliennya. Namun, permohonan itu tidak digubris pihak kejaksaan. "Kami pun tak bisa berbuat apa," jelas Bernadin.

Para tersangka SPPD fiktif yang semuanya PNS lingkup Pemkab Gianyar ini dijerat Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 (1) 1 dengan ancaman hukuman minimal 1 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Ke-14 PNS ini terantuk kasus dugaan SPPD fik- tif senilai Rp 90 juta saat masih

bertugas di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Gianyar tahun 2013.

Menurut Kasi Pidsus Kejari Gianyar, Herdian Rahadi SH, kasus dugaan SPPD fiktif ini bermula dari adanya dua pegawai di Kantor Dispenda Gianyar yang saling lapor polisi pada 2013 silam. Dari saling lapor ke polisi ini, kasusnya kemudian dilidik intensif jajaran Polda Bali. Sam- pai akhirnya polisi menemukan kasus dugaan SPPD fiktif ini.

Terungkap, sekitar Novem- ber 2013 lalu, 14 PNS yang masih berdinan di Dispenda Gianyar ini melakukan perjala- nan dinas ke Depok, Jawa Barat, sesuai SPPD. Namun, ternyata hanya 2 orang dari mereka yang melakukan kegiatan ke Depok. Sedangkan sebagian lagi melakukan kunjungan pribadi ke Bogor, Jawa Barat.

Bahkan, 4 orang di antara me- rika (terdiri dari 2 PNS lelaki dan 2 PNS perempuan) justru mel- ancong ke Thailand. Sedangkan dalam perjalanan dinas gelom- bang kedua, ada yang berangkat dengan SPPD ke Bogor, Jawa Barat. Namun, mereka nyatanya melakukan perjalanan ke Malay- sia. Mereka pun diduga korupsi secara bersama-sama sebesar Rp 90 juta melalui SPPD fiktif.

Sementara itu, Rutan Gianyar kini dihuni 105 narapidana (napi) dan tahanan, menyusul dijebloskannya 14 PNS tersang- ka kasus dugaan korupsi mel- alui SPPD fiktif, Rabu kemarin. Soalnya, sebelum masuknya 14 PNS ini, sudah ada 91 napi dan tahanan di Rutan Gianyar.

"Pimpinan kami sedang men- gusulkan pemindahan beberapa napi ke LP lainnya di Bali. Usulan diajukan Kanwil Kemenkum HAM Provinsi Bali. Usulan pem-indahan ini dilakukan, karena hunian ideal di Rutan Gianyar sebetulnya hanya 70 orang," je- las Kepala Satuan Pengamanan Rutan Gianyar, IB Duwikora Pu- tra, saat dikonfirmasi NusaBali, Rabu kemarin. **Isa**



# Dermaga Curah Tak Sesuai Zonasi RTRW

★ Pemkab Buleleng Surati Kemenhub

Setelah dokumen itu dipelajari, perencanaan pembangunan dermaga curah cair disebut kurang sesuai dengan zone kawasan industri seperti diatur dalam Perda RTRW.

SINGARAJA, NusaBali

Pemkab Buleleng ternyata telah berkirin surat ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) guna memastikan sinkronisasi Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Celukan Bawang, di Kecamatan Gerogak dengan Perda RTRW Kabupaten. Surat yang dikirim berisi agar RIP Celukan Bawang dikaji ulang dengan memperhatikan kebijakan di kabupaten yakni Perda RTRW.

Informasi yang dihimpun, sejak pembangunan dermaga curah cair timbulkan pro kontra kewenangan, pihak PT Pelindo III Surabaya cabang Celukan Bawang langsung kirim dokumen RIP kepada Pemkab Buleleng. Ternyata setelah dokumen itu dipelajari, perencanaan



PROYEK Dermaga Curah yang tengah dibangun di Celukan Bawang. • NUSABALI/SUDIRTA

pembangunan dermaga curah cair kurang sesuai dengan zone kawasan industri seperti diatur dalam Perda RTRW. Pemkab pun minta agar dokumen RIP Celukan Bawang itu dikaji ulang dengan mengakomodir kepentingan dan kondisi di daerah.

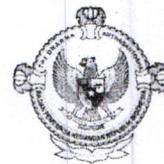
Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Buleleng, I Gede Gunawan AP yang dikonfirmasi Rabu (28/10) membenarkan jika

Bupati sudah berkirin surat ke Kemenhub terkait dengan dokumen RIP Celukan Bawang. Disebutkan, surat yang dikirim tersebut telah diterima oleh pejabat yang membidangi di Kemenhub RI. "Pada intinya, Kemenhub menyambut positif permintaan kita dari kabupaten," ujar Gunawan.

Diungkapkan, saat ini Kemenhub masih mengkaji kembali dokumen RIP tersebut yang

Edisi : Kamis, 29 Oktober 2015

Hal : 4



kemudian disesuaikan dengan penetapan zone industri kawasan Pelabuhan Celukan Bawang. Sikap Kemenhub yang mengakomodir keinginan Pemkab ini dipastkan persoalan yang selama ini mencuat di media massa akan bisa diakhiri dan pengembangan kawasan pelabuhan akan berjalan tanpa menimbulkan permasalahan atau bahkan pelanggaran regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. "Kami sudah minta penjelasan ke Kemenhub dan pada intinya keinginan Pemkab akan diakomodir. Kita akan menunggu jawaban surat dan dokumen RIP itu akan disesuaikan dengan penetapan zone industri kawasan Pelabuhan Celukan Bawang," imbuhnya.

Sebelumnya, Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana angkat bicara masalah kewenangan dalam menyikapi pembangunan dermaga curah cair. Bupati menyebut, Pemkab Buleleng berhak mengetahui rencana pembangunan tersebut, karena menyangkut aspek kewilayahan. Masalahnya, Pemkab Buleleng punya Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dimana wilayah Celukan Bawang diatur didalamnya sebagai kawasan industri. "Jangan semata-mata berbicara otoritas. Apapun kegiatan itu baik dari pusat, provin-

si dan kabupaten, tentu harus memperhatikan aspek ekonomi dan sosialnya. Dan kami berhak mengetahui rencana tersebut. Tapi selama ini kami tidak pernah tahu rencana itu," ungkap.

Bupati mengaku menyadari dari segi regulasi, perizinan pembangunan dermaga curah cair tersebut diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI melalui Direktorat Jendral Perhubungan Laut. Namun demikian, sejalan dengan nafas otonomi daerah, setiap investasi baik swasta dan pemerintah harusnya ada koordinasi dan komunikasi dengan provinsi dan kabupaten. "Kita tidak ada menghambat atau tidak mendukung program pusat dalam mengembangkan poros maritim, tetapi perlu diperhatikan jangan sampai investasi itu bertentangan dengan Perda RTRW Provinsi maupun RTRW Kabupaten," katanya.

Dalam hal ini, Bupati Putu Agus menegaskan, pihaknya tetap membuka diri untuk menjalin komunikasi terkait rencana pembangunan tersebut. Dirinya pun berharap, pihak pengelola pelabuhan celukan bawang bisa menyampaikan rencana pembangunan dermaga curah cair tersebut. k19



## Manipulasi Pengajuan Kredit, Dua Petani Disidang

DENPASAR, NusaBali

Dua terdakwa kasus dugaan korupsi dana Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) Gianyar, yaitu I Ketut Ludri dan I Made Astika alias Genep, selaku Ketua dan Bendahara Kelompok Tani Ternak Suar Sari di Banjar Penyabangan, Desa Kerta, Kecamatan Payangan, Gianyar jalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Denpasar pada, Rabu (28/10).

Dalam sidang yang dipimpin majelis hakim pimpinan Dewa Suardita, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Herdian Rahardi dkk membacakan dakwaan untuk kedua terdakwa yang didampingi kuasa hukumnya, Made Andyana dkk. Dalam dakwaan dijelaskan jika kasus ini terjadi mulai 2010 hingga 2014.

Ludri bersama dengan Made Astika alias Genep melakukan tindak pidana korupsi, yakni menggu-

nakan nama-nama orang lain agar kreditnya bisa digunakan sendiri. Keduanya juga memanipulasi nama-nama, tandatangan anggota kelompok, serta memanipulasi pengajuan kredit KKP-E di luar peruntukan yang seharusnya dibagikan kepada anggota kelompok ternak untuk kepentingan pengembangan usaha ternak.

Awalnya pada 24 Maret 2008 Kelompok Tani Suar Sari di Banjar Penyabangan, Desa Kerta, Payangan, Gianyar mengajukan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) sebesar Rp 540 juta. Dilanjutkan dengan kredit pada 3 Mei 2010 sebesar Rp 998.650.000 dan yang ketiga pada 26 Mei 2012 sebesar Rp 1.125.000.000.

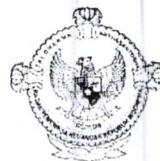
Namun uang tersebut tidak seluruhnya disalurkan ke anggota untuk pengembangan usaha ternak

sesuai proposal yang diajukan. Uang tersebut malah digunakan untuk membayar utang di LPD serta digunakan untuk kepentingan pribadi kedua terdakwa dan kerabatnya. "Akibatnya negara mengalami kerugian Rp252.624.738 sesuai perhitungan BPK," ujar JPU dalam dakwaan.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua terdakwa ini dijerat pasal berlapis, yaitu pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18, subsider pasal 3 Jo pasal 18, lebih subsider lagi pada pasal 9 Jo pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang Pembantasan tindak pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU RI no 20 tahun 2001, tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang pembantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP. rez

Edisi : Kamis, 29 Oktober 2015

Hal : 5



# Payung ✓ Hukum Bansos Disetujui

★ Penerima di Bawah Desa Adat  
Tidak Perlu Berbadan Hukum



Ketua  
DPRD Bali  
kemarin  
jemput bola  
ke Kemendagri  
di Jakarta,  
bersama  
Asisten I

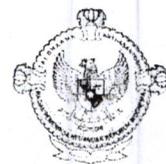
DENPASAR, NusaBali  
Dana bansos/hibah  
senilai Rp 46 miliar yang  
difasilitasi 55 anggota  
DPRD Bali, dipastikan  
bisa cair. Pasalnya,  
Menteri Dalam Negeri  
(Mendagri) Tjahjo  
Kumolo telah mem-  
berikan lampu hijau  
Peraturan Gubernur  
(Pergub) yang dia-  
jukan Pemprov Bali  
sebagai payung hu-  
kum pencairan ban-  
sos. Nantinya, kelompok  
penerima bansos yang ber-  
naung di bawah desa adat,

Ketua DPRD Bali  
Nyoman Adi Wiryatama

Bersambung ke Hal-15 Kolom 1

Edisi : Kamis, 29 Oktober 2015

Hal : 1



Sambungan. - -

## Payung Hukum Bansos Disetujui

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

tidak perlu harus berbadan hukum.

Kepastian dibolehkannya pencairan dana bansos dengan payung hukum Pergub ini diperoleh setelah Ketua DPRD Bali, Nyoman Adi Wiryatama, bersama jajaran Pemprov Bali mendatangi Mendagri Tjahjo Kumolo di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (28/10). Bahkan, Pergub yang sebelumnya diajukan Pemprov Bali sebagai payung hukum pencairan bansos, telah dibawa pulang dari Kemendagri oleh Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Provinsi Bali, Dewa Putu Eka Wijaya Wardana, Rabu kemarin.

"Sudah tidak ada masalah lagi. Proses di Kemendagri sudah selesai. Pergub yang diajukan lolos verifikasi dan sudah ditandatangani Mendagri. Pergubnya sudah dibawa pulang ke Bali oleh Asisten I Bidang Pemerintahan, Dewa Putu Eka Wijaya Wardana," ujar Adi Wiryatama saat dikonfirmasi NusaBali di Jakarta kemarin.

Menurut Adi Wiryatama, pihaknya kemarin menemui Mendagri Tjahjo Kumolo di Kemendagri, Jakarta. Dalam pertemuan itu, Mendagri Tjahjo Kumolo menegaskan penerima bansos yang diharuskan berbadan hukum sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Surat Edaran (SE) Mendagri, tidak ada masalah lagi. Sebab, lembaga penerima bansos di

Bali yang bernaung di bawah desa adat, diatur dengan Perda Desa Pakraman. Dan, itu sudah jelas bisa menerima dana bansos/hibah.

"Jadi, yang berada di bawah naungan desa adat seperti pura, subak, sekaa, dan banjar, bisa menerima dana bansos," tandas politisi senior PDIP yang mantan Bupati Tabanan dua kali periode (2000-2005 dan 2005-2010) ini.

Adi Wiryatama menceritakan, pertemuan dengan Mendagri Tjahjo Kumolo di Jakarta, Rabu kemarin, ber-

langsung alot. Rombongan DPRD Bali yang dipimpin Adi Wiryatama hanya sempat bertemu beberapa menit dengan Mendagri Tjahjo Kumolo di sela-sela apel di Kemendagri.

Dalam pertemuan singkat itu, Mendagri Tjahjo Kumolo memberikan jaminan bansos/hibah bisa cair. Lalu, Mendagri Tjahjo Kumolo melimpahkan penanganan bansos/hibah untuk Bali ini kepada Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri buat diselesaikan segera. Pasalnya, Tjahjo kemarin mendadak dipanggil ke Istana Negara Jakarta.

"Akhirnya, kita ditemui Dirjen Otda Kemendagri, Bu Purniasih. Pada intinya, bansos/hibah tak ada masalah lagi. Bansos bisa dicairkan dengan payung hukum Pergub. Dan, Pergub sudah diverifikasi dan telah ditandatangani Mendagri. Pergub sudah dibawa ke Bali oleh Asisten I Setda Provinsi, sementara saya sendiri masih nyangkut di Jakarta karena ng-

gak dapat tiket pesawat," tegas politisi asal Banjar Tegeh, Desa Angseri, Kecamatan Baturiti, Tabanan ini.

Menurut Adi Wiryatama, pihaknya sempat membeber dampak berat jika bansos /hibah untuk masyarakat Bali sampai tidak bisa cair. Masalahnya, sebagian penerima bansos adalah pura-pura, desa adat, subak, dan banjar. Desa adat, pura, dan subak adalah penopang dan menjaga adat dan budaya di Bali.

"Saya katakan kalau bansos sampai tidak cair, 1.488 desa adat di Bali dengan jutaan krama akan turun melakukan desakan kepada pemerintah. Apalagi, 40 persen dana bansos yang dicairkan di Bali adalah untuk kegiatan adat dan keagamaan. Saya minta supaya disampaikan ke Presiden Jokowi masalah soal ini, jangan sampai Bali diabaikan," tegas Adi Wiryatama yang kini Sekretaris Dewan Pertimbangan Daerah (Deperda) PDIP Bali.

Sayangnya, Asisten I Setda Provinsi Bali, Dewa Putu Eka

Wijaya Wardana, belum berhasil dikonfirmasi NusaBali terkait lolosnya Pergub sebagai payung hukum pencairan bansos ini. Saat dihubungi melalui telepon, Rabu kemarin, ponselnya bernada mailbox. Sekda Provinsi Bali, Tjokorda Ngurah Pemayun, juga belum bisa dihubungi, karena tidak mengangkat ponselnya.

Dana bansos untuk masyarakat yang difasilitasi 55 anggota DPRD Bali melalui AP-

BD Perubahan 2015, mencapai total Rp 46 miliar. Dana bansos sempat terancam tidak cair, karena ada ketentuan penerima harus berbadan hukum. Karenanya, Pemprov Bali mengajukan Pergub ke Kemendagri sebagai payung hukum untuk pencairan bansos.

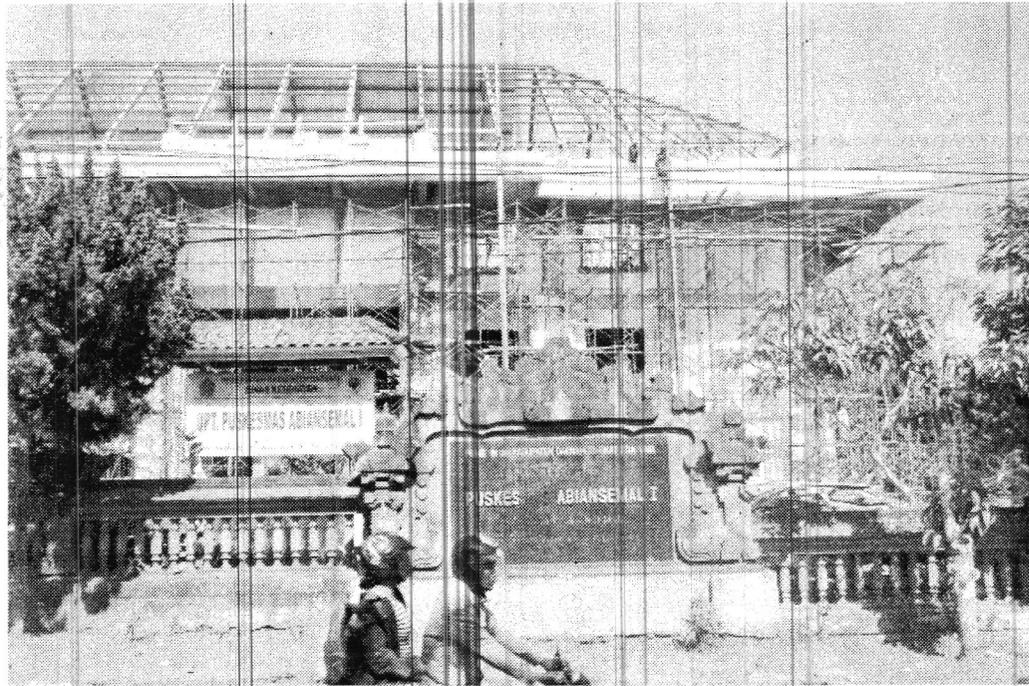
Sementara itu, Sekretaris Komisi III DPRD Bali, Wayan Disel Astawa, menyatakan pencairan bansos/hibah sudah sangat mepet waktunya. Pasalnya, tahun anggaran akan segera berakhir pada Desember 2015. Sementara kelompok masyarakat sudah telanjur mengajukan proposal.

Karena itu, para pemangku kepentingan di Bali mulai dari Gubernur, Bupati/Walikota, kepolisian, kejaksaan, hingga BPKP diminta membuat MoU untuk memperkuat payung hukum pencairan bansos. "Supaya terjaga dan lebih kuat dari sisi legalitas, serta ada sikap saling percaya antar lembaga, buat saja MoU. Ini demi kepentingan rakyat Bali," ujar Disel Astawa secara terpisah di Gedung DPRD Bali, Niti Mandala Denpasar, Rabu kemarin.

Politisi PDIP asal Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Badung ini mengingatkan, tanpa ada keberanian para pemegang kebijakan dan kewenangan di Bali, maka akan terus terjadi keraguan bahwa pencairan bansos ini tidak aman dari kasus hukum. "Hemat kami, perkuat payung hukumnya dengan kesepakatan bersama," tegas Disel Astawa. **nat**



# Pembangunan Puskesmas Terancam Molor



● NUSABALI/YUDA

PEKERJA menyelesaikan pembangunan gedung Puskesmas Abiansemal I, Rabu (28/10). Pembangunan gedung tersebut terancam tak selesai tepat waktu, yakni Desember 2015.

**Proyek pembangunan Puskesmas Abiansemal I ditarget selesai Desember 2015. Namun hingga kini, pekerja masih menggarap bagian atap.**

MANGUPURA, NusaBali

Proyek pembangunan gedung baru Puskesmas Abiansemal I terancam tidak selesai tepat waktu, karena banyak pekerjaan yang belum

dikerjakan. Hingga akhir Oktober ini, proyek pengerjaan fisik masih berlangsung, padahal deadline proyek tersebut Desember 2015.

Berdasarkan pantauan, para pekerja masih berkutat pada struktur rangka atap yang terbuat dari baja. Style Bali pada dinding bagian luar gedung pun sama sekali belum dikerjakan. Padahal pada bagian inilah pekerjaan yang paling membutuhkan waktu lama.

Sangat dimungkinkan, bangunan dengan biaya Rp 17 miliar lebih ini terancam tidak selesai tepat waktu alias molor.

Camat Abiansemal I Putu Ngurah Thomas Yuniarta, saat dikonfirmasi enggan memberikan komentar. Ia berkilah pembangunan ge-

dung baru itu adalah di bawah leading sector Dinas Cipta Karya (DCK) Badung. "Saya sempat koordinasi dengan DCK, katanya tahun anggaran 2015 ini akan selesai," ucapnya, Rabu (28/10).

Selama gedung Puskesmas Abiansemal I diperbaiki, bagaimana pelayanan kesehatan bagi masyarakat? Thomas Yuniarta mengaku pelayanan tetap diberikan. "Tetap mendapatkan pelayanan di bangunan sebelah selatannya," tandas mantan Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Badung, itu.

Secara terpisah, Kepala DCK Badung Ni Putu Dessy Darmayanti tidak menampik kondisi yang terjadi. Bahkan ia mengaku telah mengingatkan rekanan agar mempercepat pengerjaan proyek.



Menurut pengakuannya, dari peninjauan yang telah dilakukan deviasi atau progress pengerjaan sangat kecil. Sayangnya ia tak merinci progress pengerjaan dimaksud. "Memang masih di atas target tapi deviasinya sangat kecil. Makanya kami mengingatkan rekanan agar melakukan percepatan," tegas Dessy.

Menurutnya, pihaknya sudah meminta pihak rekanan menambah jumlah tenaga kerja. Sehingga dimungkinkan pengerjaan jauh lebih cepat.

Bagaimana bila pengerjaan molor? Perempuan asal Denpasar itu menyatakan akan mengenakan denda atau penalti kepada pihak rekanan. "Sesuai ketentuan, jika terlambat maka akan dikenakan penalti," tukas Dessy.

Untuk diketahui, Gde Agung semasih menjabat sebagai Bupati Badung berkali-kali mengingatkan rekanan agar cepat dalam pengerjaannya. Bahkan tidak hanya cepat tapi juga menjaga kualitas pengerjaan. "Proyek ini sama dengan membangun gedung rumah sakit. Saya tidak mau ada yang mengelupas, apalagi retak," ujarnya kala meninjau proyek tersebut, Juli 2015 lalu. Gde Agung minta komitmen rekanan bahwa yang bersangkutan benar-benar sanggup menyelesaikan pembangunan Puskesmas Abiansemal I.

Hingga akhir 2014 Kabupaten Badung telah memiliki 13 Puskesmas dan 54 Pustu. Dinas Kesehatan juga melaksanakan pelayanan UGD 24 jam di enam puskesmas kecamatan yaitu Puskesmas Petang I, Abiansemal I, Mengwi I, Kuta I, Kuta Utara, dan Kuta Selatan. **as**



## Reses Tanpa Bansos, Dewan Pengeng



Anggota DPRD Karangasem 2014-2019 saat dilantik, setahun lalu.

• NUSABALI/NANTRA

AMLAPURA, NusaBali

Segecap anggota DPRD Karangasem yang berjumlah 45 orang *pengeng* (pusing) menghadapi reses (terjun serap aspirasi). Masalahnya, mereka harus melakukan reses tanpa disertai membawa dana bansos/hibah, menyusul aturan baru bahwa penerima bantuan harus berbadan hukum.

Berdasarkan aturan baru UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 298 (4) dan ayat (5), dise-

butkan belanja hibah (bansos) dapat diberikan kepada: pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan, lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. Sedangkan kelompok masyarakat, termasuk di Karangasem, yang difasilitasi anggota Dewan untuk menerima bansos, justru sebagian besar ti-

Bersambung ke Hal-15 Kolom 5

KEANGGOTAAN DPRD KARANGASEM BERDASAR PILEG 2014			
NO	PARTAI	KURSI	KEKUATAN
1	Golkar	13	28,90 Persen
2	PDIP	12	26,67 Persen
3	Gerindra	5	11,11 Persen
4	Demokrat	5	11,11 Persen
5	NasDem	5	11,11 Persen
6	Hanura	2	4,44 Persen
7	PKPI	2	4,44 Persen
8	PKS	1	2,22 Persen
<b>TOTAL</b>		<b>45</b>	<b>100,00 Persen</b>

Edisi : Kamis, 29 Oktober 2015

Hal : 1



Sambungan - - -

## Reses Tanpa Bansos, Dewan Pengeng

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

dak berbadan hukum.

Wakil Ketua DPRD Karangasem dari Fraksi Gerindra, Ida Bagus Adnyana, mengakui para anggota Dewan kesulitan turun ke bawah menemui masyarakat, gara-gara tidak cairnya dana bansos. Menurut IB Adnyana, setiap anggota Dewan memang kebagian dana Rp 3 juta selama reses. Namun, hal itu sangat tidak mencukupi untuk terjun ke tengah masyarakat.

"Bagaimana mungkin menurunkan warga masyarakat satu kampung dengan dana reses Rp 3 juta? Apa masyarakat tidak perlu diberikan makan dan minum? Jadi, anggota Dewan yang memaksakan turun ke masyarakat di saat reses ini, dipastikan akan tekor," ujar politisi Gerindra asal Griya Suci, Banjar

Gunung Biau, Desa Pakraman Muncan, Kecamatan Selat, Karangasem ini saat dikonfirmasi NusaBali di Amlapura, Rabu (28/10).

Paparan hampir senadsa juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Karangasem dari Fraksi PDIP, I Made Wirta. Bahkan, Made Wirta mengaku tidak menjalankan program reses kali ini, menyusul tersendatnya pencairan dana bansos. "Bagaimana bisa reses, tak ada anggaran. Kita mau bilang apa kepada konstituen," keluh Made Wirta secara terpisah di Amlapura, Rabu kemarin.

Sebaliknya, Ketua DPRD Karangasem dari Fraksi Golkar, I Nengah Sumardi, mengaku tidak masalah reses tanpa dana bansos. Dia punya jurus untuk mengatasi masalah ini. Caranya, dengan menyerap aspirasi, selanjutnya memperjuangkan usulan masyarakat ke

Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang).

"Bisa kok kita memperjuangkan aspirasi, tidak harus melalui bansos. Cuma, mekanismenya cukup panjang dan menganut sekala prioritas," jelas Nengah Sumardi, politisi Beringin asal Banjar Kreteg, Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem yang notabene adik kandung mantan Bupati danb Ketua DPD II Golkar Karangasem, Wayan Geredeg.

Sedangkan anggota DPRD Karangasem dari Fraksi Golkar, I Wayan Tama, mengaku pihaknya tetap menjalankan reses, walaupun tanpa bansos. "Reses itu kan mesti berjalan, walau tanpa bansos. Ya, pintar-pintarnya anggota Dewan di lapangan-lah," tegas Wayan Tama.

Sementara itu, berdasarkan data yang dihimpun NusaBali, ada dana bansos senilai total Rp

23 miliar di APBD Perubahan 2015 yang telah disepakati DPRD Karangasem dan Pemkab Karangasem dialihkan untuk membiayai kegiatan. Khusus bansos di Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdakab Karangasem saja yang belum cair mencapai Rp 11,53 miliar. Bansos Rp 11,53 miliar dari 698 item proposal ini semuanya dialihkan ke infrastruktur.

Ada pula bansos senilai Rp 4,17 miliar dari 269 item proposal yang sudah telanjur cair di Bagian Kesra. Menurut Kabag Kesra Setkab Karangasem, IB Gede Pidada, terlanjur cairnya dana bansos Rp 4,17 miliar tersebut belum sepenuhnya dipertanggung jawabkan secara administrasi. "Masih banyak belum melaporkan pertanggungjawaban secara administrasi," jelas IB Pidada, Rabu kemarin. **k16**



## Sidang Dugaan Korupsi BP3TKI Denpasar

# Uang Hasil Mark Up Rp 1,5 Miliar

DENPASAR, NusaBali

Pemeriksaan saksi dalam kasus dugaan mark up pengadaan lahan kantor BP3TKI (Badan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) Denpasar yang merugikan negara Rp 2,2 miliar dinyatakan selesai oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Denpasar. Meski sudah seluruh saksi diperiksa, namun majelis hakim masih belum mengetahui ke mana aliran uang hasil mark up Rp 1,5 miliar.

Hal ini diungkapkan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, Edward Harris Sinaga yang memimpin sidang pada, Rabu (28/10). Sidang kali ini mengagendakan pemeriksaan kedua terdakwa, yaitu I Wayan Pageh (Kepala BP3TKI Denpasar) dan Prio Adi Santoso (Pejabat Pembuat Komitmen), serta saksi lainnya dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), notaries dan BPN (Badan Pertanahan Negara).

Edward mengatakan dari uang hasil mark up yang mencapai Rp 2,2 miliar, hanya uang sekitar Rp 700 juta saja yang diketahui mengalir ke kantong terdakwa I Wayan Pageh, Prio Adi Santoso dan Trusti Prio Sambodo (tersangka dalam berkas terpisah).

Sementara sisa uang mark up Rp 1,5 miliar tidak jelas men-

## Masih Misteri

galir ke mana. Padahal semua saksi termasuk kedua terdakwa menyatakan uang Rp 1,5 miliar diambil Wahyu Matondang alias Dodik yang merupakan staf khusus Kepala BNP2TKI di Jakarta. Namun, dalam sidang Dodik terus membantah pernah menerima uang tersebut. "Yang

jelas hanya aliran uang Rp 700 juta, sisanya Rp 1,5 miliar kita tidak tahu ke mana," ujar Edward.

Pageh yang kemarin diperiksa sebagai terdakwa mengaku hanya menerima uang hasil mark up Rp 200 juta. Sementara terdakwa Prio mengaku hanya mendapat Rp 150 juta. Pengakuan Prio ini

sendiri jauh berbeda dengan keterangan pemilik tanah Paramartha dan Trusti yang mengatakan dirinya menerima Rp 450 juta.

Sementara saksi ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diperiksa di Pengadilan Tipikor Denpasar mengatakan sempat melakukan in-

vestigasi pengadaan lahan ini sebelum Mabes Polri melakukan penyelidikan. Dalam investigasi ini, BPK menemukan kerugian negara Rp 2,2 miliar. Namun BPK juga menyatakan tidak bisa melusuri uang Rp 1,5 miliar yang diserahkan ke Dodik. "Kami juga buntu di Dodik karena dia mengaku tidak pernah terima uang tersebut," ujar saksi ahli BPK ini. Selain mengalir ke kantong tiga pejabat BP3TKI Denpasar, uang hasil mark up diketahui mengalir ke seluruh staf kantor BP3TKI yang dibagikan oleh Kepala BP3TKI Denpasar, Pageh.

Selain itu, notaris Putu Candra juga mengaku menerima uang Rp 67 juta dari BP3TKI Denpasar. Notaris Candra yang diperiksa mengaku uang tersebut merupakan pembayaran pengurusan jual beli tanah seluas 4,5 are untuk kantor BP3TKI di Jalan Danau Tempe, Denpasar. "Uang Rp 67 juta itu diantar pemilik tanah (Paramartha, red) ke kantor dan diterima staf saya," jelas Candra dalam sidang. Selanjutnya sidang pada, Rabu (4/11) mendatang akan mengagendakan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). **rez**



• NUSABALI/HENDRA  
TERDAKWA kasus korupsi dan mark up Lahan BP3TKI Denpasar, I Wayan Pageh (kiri) dan Priyo Adi Santoso saat sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (28/10).

Edisi : Kamis, 29 Oktober 2015

Hal : 5



## Telusuri Oknum Pol PP Bekingi Hotel Bodong, Inspektorat Kumpulkan Data ✓

SINGARAJA, NusaBali

Inspektorat Buleleng ternyata sudah bekerja terkait tuduhan ada oknum anggota Satpol PP lindungi hotel yang tidak berizin tetap beroperasi. Inspektorat kini tengah kumpulkan data terkait perilaku 'nakal' oknum Satpol PP.

Kepala Inspektorat I Putu Yasa Rabu (28/10) mengaku, data awal yang telah dipegang adalah pernyataan dari anggota Badan Anggaran (Bangar) DPRD Buleleng yang nota bene adalah Ketua Komisi II, Putu Mangku Budiasa, terkait keterlibatan oknum anggota Pol PP. Kini, data tersebut tinggal di croscheck dengan data temuan di lapangan. "Data awal seperti disampaikan oleh dewan sudah kami pegang dan data itu perlu kami lengkapi dengan data di

lapangan. Begitu nanti kami terima surat perintah, tinggal mengkaji data yang ada dan memohon petunjuk lebih lanjut," katanya.

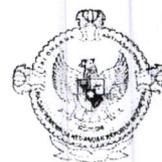
Menurut Yasa, seluruh data maupun keterangan di lapangan nantinya akan dipelajari oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek). Berdasarkan data dan kajian internal Bapek akan memutuskan apakah oknum anggota Pol PP yang disebut-sebut melindungi hotel bodong itu terbukti bersalah atau tidak. Selain itu, Bapekda sendiri yang akan menjatuhkan sanksi jika oknum anggota Pol PP itu dinyatakan melakukan pelanggaran dalam melaksanakan tugas-tugasnya. "Semua itu Bapekda yang akan berwenang menjatuhkan sanksi apabila ada pelanggaran dalam tugas-tugas Pol PP

dan kami hanya menggali data dan menyampaikan kepada pimpinan daerah," tegasnya.

Sementara pihak Badan Satpol PP dan Linmas Buleleng belum memberikan klarifikasi terkait dugaan yang diberitakan anggota dewan tersebut. Kepala Badan Pol PP dan Linmas Buleleng Made Budi Astawa sedang tugas ke luar kota. Sedangkan para kepala bidang (Kabid) tidak berani memberikan keterangan ketika wartawan hendak meminta konfirmasi terkait tuduhan dewan tersebut. Sementara itu, Komisi I dan Komisi II DPRD Buleleng untuk memanggil Kepala Badan Pol PP dan Linmas Budi Astawa juga belum ada jadwal pasti karena masih menunggu kedatangan Budi Astawa dari tugas dinas di luar kota. **k19**

Edisi : Kamis, 29 Oktober 2015

Hal : 4



## 14 PNS Pemkab Gianyar Dijebloskan ke Tahanan

★ Jadi Tersangka Dugaan SPPD Fiktif

GIANYAR, NusaBali

Pihak kejaksaan akhirnya jebloskan 14 pegawai negeri sipil (PNS) lingkup Pemkab Gianyar yang tersangkut sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Rp 90 juta melalui Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Fiktif ke sel tahanan, Rabu

(28/10) sore. PNS yang sebagian perempuan ini ditahan di Rutan Gianyar, setelah lebih dulu menjalani pemeriksaan administrasi dan kesehatan di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Gianyar.

Bersambung ke Hal-15 Kolom 5

Edisi : Kamis, 29 Oktober 2015

Hal : 1



Sambungan - - -

## 14 PNS Pemkab Gianyar Dijebloskan ke Tahanan!

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

Ke-14 PNS yang dijebloskan ke sel tahanan, Rabu sore sekitar pukul 16.20 Wita itu, masing-masing Sang Ayu Made Ika Kencana Dewi (Staf Camat Tampaksiring), Ni Ketut Juni-antari (Staf Dinas Perhubungan Gianyar), Ni Ketut Suniawati (Staf Bagian Hukum Pemkab Gianyar), Ni Made Ayu Purniasih (Staf Pemkab Gianyar), AA Istri Agung Yunariawati (Staf Camat Gianyar), Ni Wayan Suci-asih (PNS Pemkab Gianyar), Dewa Made Putra (Sekretaris Camat Tampaksiring), I Ketut Ritama (Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan Ubud), I Ketut Puja (Staf Camat Tegallalang), I Made Darmaja (Staf Camat Gianyar), I Komang Yastara (Staf Camat Gianyar), I Made Wirawan (PNS Dispenda Gianyar), I Nyoman Sulandra (Staf Camat Ubud), dan I Made Suparta (Staf Dispenda Gianyar).

Sebelum diperiksa di Kejari Gianyar, lanjut dijebloskan ke Rutan Gianyar, Rabu sore, 14 PNS tersangka SPPD fiktif ini lebih dulu dilimpahkan penyidik Polda Bali ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali di Jalan Letda Tantulr Niti Mandala Denpasar. Pihak Kejati Bali kemudian menyerahkan penanganan kasus ini berikut para tersangkanya ke Kejari Gianyar.

Para PNS tersangka SPPD fiktif ini dibawa dari Kejati Bali hingga tiba di Kejari Gianyar, Rabu siang sekitar pukul 11.00 Wita. Begitu tiba, mereka langsung menjalani pemeriksaan administrasi dan kesehatan. Ke-14 PNS tersangka SPPD fiktif ini didampingi tiga pengacara

Pantauan NusaBali, kedatangan para tersangka di Kejari Gianyar kemarin, sempat dijenguk sejumlah anggota keluarga mereka. Beberapa di antara anggota keluarga itu sempat menan-gis, sehingga mengundang perhatian sejumlah pegawai Kejari Gianyar. Oleh pegawai ke-

jaksan, anggota keluarga yang menangis itu disarankan menin-ggalkan kantor Kejari Gianyar. Sedangkan 14 PNS tersangka SPPD fiktif langsung mengenakan masker dan mengambil jaket serta kain untuk menutupi wajahnya, begitu mengetahui kedatangan awak media.

Kepala Kejaksaan Negeri (Ka-jari) Gianyar, I Ketut Sumedana SH, mengatakan pihaknya hanya menerima limpahan berkas kasus dan para tersangka, berikut barang bukti, dari Kejati Bali. Kemudian, para tersangka menjal-ni pemeriksaan administrasi dan kesehatan, sebelum kemu-dian diangkut ke Rutan Gianyar, Rabu sore pukul 16.20 Wita, menggunakan Minibus.

"Setiap tersangka kasus dugaan korupsi pasti kami tahanan. Ini untuk mempermudah dalam proses hukum. Selain itu, agar tersangka tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti, serta tidak mempengaruhi yang lain," ujar Kajari Ketut Sumedana.

Menurut Sumedana, pengacara para tersangka sudah sempat coba mengajukan permohonan agar pihak kejaksaan tidak menahan kliennya. "Namun, permohonan itu tetap tidak kami kabulkan," katanya.

Salah satu kuasa hukum 14 PNS tersangka SPPD fiktif, Bernadin SH, juga mengakui pihaknya sudah mengajukan permohonan agar tidak ada penahanan terhadap kliennya. Namun, permohonan itu tidak digubris pihak kejaksaan. "Kami pun tak bisa berbuat apa," jelas Bernadin.

Para tersangka SPPD fiktif yang semuanya PNS lingkup Pemkab Gianyar ini dijerat Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 (1) 1 dengan ancaman hukuman minimal 1 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Ke-14 PNS ini terantuk kasus dugaan SPPD fiktif senilai Rp 90 juta saat masih

bertugas di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Gianyar tahun 2013.

Menurut Kasi Pidsus Kejari Gianyar, Herdian Rahadi SH, kasus dugaan SPPD fiktif ini bermula dari adanya dua pegawai di Kantor Dispenda Gianyar yang saling lapor polisi pada 2013 silam. Dari saling lapor ke polisi ini, kasusnya kemudian dilidik intensif jajaran Polda Bali. Sampai akhirnya polisi menemukan kasus dugaan SPPD fiktif ini.

Terungkap, sekitar November 2013 lalu, 14 PNS yang masih berdinan di Dispenda Gianyar ini melakukan perjalanan dinas ke Depok, Jawa Barat, sesuai SPPD. Namun, ternyata hanya 2 orang dari mereka yang melakukan kegiatan ke Depok. Sedangkan sebagian lagi melakukan kunjungan pribadi ke Bogor, Jawa Barat.

Bahkan, 4 orang di antara mereka (terdiri dari 2 PNS lelaki dan 2 PNS perempuan) justru mel-ancong ke Thailand. Sedangkan dalam perjalanan dinas gelombang kedua, ada yang berangkat dengan SPPD ke Bogor, Jawa Barat. Namun, mereka nyatanya melakukan perjalanan ke Malaysia. Mereka pun diduga korupsi secara bersama-sama sebesar Rp 90 juta melalui SPPD fiktif.

Sementara itu, Rutan Gianyar kini dihuni 105 narapidana (napi) dan tahanan, menyusul dijebloskannya 14 PNS tersangka kasus dugaan korupsi melalui SPPD fiktif, Rabu kemarin. Soalnya, sebelum masuknya 14 PNS ini, sudah ada 91 napi dan tahanan di Rutan Gianyar.

"Pimpinan kami sedang mengusulkan pemindahan beberapa napi ke LP lainnya di Bali. Usulan diajukan Kanwil Kemenkum HAM Provinsi Bali. Usulan pemindahan ini dilakukan, karena hunian ideal di Rutan Gianyar sebetulnya hanya 70 orang," jelas Kepala Satuan Pengamanan Rutan Gianyar, IB Duwikora Putra, saat dikonfirmasi NusaBali, Rabu kemarin. **Isa**